

Analisis Rencana Perubahan Kewajiban Pemberitahuan Penggabungan dan Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada KPPU dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Oleh : Karina Maharani Alkhusna¹ dan Irna Nurhayati²

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewajiban pemberitahuan dan konsultasi penggabungan serta pengambilalihan saham kepada KPPU dan untuk mengetahui urgensi perubahan sistem kewajiban pemberitahuan penggabungan dan pengambilalihan saham dari *mandatory post-notification* menjadi *mandatory pre-notification*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer, sekunder dan tersier serta melakukan wawancara dengan narasumber dan responden. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian dengan pendekatan naratif deskriptif sehingga mendapat kesimpulan dan menjawab permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kewajiban pemberitahuan penggabungan dan pengambilalihan saham kepada KPPU belum berjalan dengan optimal, minat pelaku usaha terhadap konsultasi penggabungan dan pengambilalihan saham kepada KPPU masih rendah dan perubahan sistem pengawasan penggabungan dan pengambilalihan saham dari *mandatory post-notification* menjadi *mandatory pre-notification* perlu untuk segera dilakukan.

Kata kunci : persaingan usaha, penggabungan, pengambilalihan saham, KPPU

¹ Mahasiswi Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Legal Analysis of Alteration Plan in Merger and Acquisition Notification System to Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) in Competition Law Perspective

By: Karina Maharani Alkhusna³ and Irna Nurhayati⁴

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the implementation of the company's liability in merger and acquisition notification to the Commission, and to determine the urgency of alteration in the system of merger and acquisition notification from mandatory post-notification into mandatory pre-notification.

This research is empirical judicial research conducted by analyzing primary, secondary and tertiary library materials and also analyzing the resource person and respondent interview results. The data have been obtained and analyzed using qualitative analysis methods juridical subsequently poured in a narrative form with descriptive analysis approach so that the conclusion and answer the problems.

Based on the research results, it could be conclude that the implementation of the company's liability in merger and acquisition notification to the Commission not optimal yet, the business actor's has low interest in merger and acquisition consultation, and the change in merger and acquisition notification system from mandatory post-notification into mandatory pre-notification is urgently needed.

Key words : competition law, merger, acquisition, Commission for the Supervision of Business Competition

³ Undergraduate Student of Business Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

⁴ Lecturer of Business Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta